

Transparansi dan Akuntabilitas: Peran *Good Governance* dalam Akuntansi Sektor Publik

Belia Inka Putri¹, Angelica Astuti², Aimandika Yudha Afianta³

^{1,2,3}Universitas Negeri Malang

*belia.inka.2304226@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip-prinsip *good governance* dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi sektor publik. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menekankan pentingnya akuntansi publik sebagai sarana utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara transparansi dan akuntabilitas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Implementasi *good governance* turut berkontribusi terhadap peningkatan mutu laporan keuangan instansi publik. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih terkendala oleh persoalan birokrasi yang rumit dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi administratif dan penguatan kapasitas institusi agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara optimal dalam sektor publik.

Kata Kunci: *good governance*, transparansi, akuntabilitas, akuntansi publik, laporan keuangan

Abstract

This study aims to analyze the role of good governance principles in strengthening transparency and accountability within public sector accounting practices. Using a descriptive qualitative approach through literature review, the research highlights the significance of public sector accounting as a key instrument in achieving transparent and accountable financial management. The findings reveal a strong correlation between transparency and accountability in supporting effective governance. The implementation of good governance contributes to improving the quality of public financial reports. However, its application still faces challenges, particularly due to bureaucratic complexity and limited public participation. Therefore, administrative reforms and institutional capacity building are necessary to ensure the optimal application of transparency and accountability in the public sector.

Keyword: *good governance, transparency, accountability, public sector accounting, financial reporting*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat akan adanya sistem pemerintahan yang bersih, terbuka, partisipatif, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pencapaian kinerja pemerintahan yang optimal sangat bergantung pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* telah menjadi pilar utama dalam agenda reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam sistem ini, akuntansi sektor publik tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik, sedangkan akuntabilitas menekankan pada kewajiban setiap lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara jujur dan terbuka.

Pelaporan keuangan sektor publik memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan (Yuniar et al. 2023).

Meski demikian, rendahnya implementasi prinsip-prinsip *good governance* ini sering dikaitkan dengan berbagai persoalan struktural dalam birokrasi Indonesia, seperti ketidakjelasan regulasi, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan (Susanto, 2019). Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi secara mendalam sejauh mana penerapan *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas yang berperan dalam memperkuat praktik akuntansi sektor publik.

Penerapan prinsip *good governance* di Indonesia terus mengalami perkembangan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Upaya reformasi birokrasi dan implementasi *e-government* telah dilakukan, namun realisasinya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Permasalahan seperti masih tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik menunjukkan tren yang positif, seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya berdampak pada sektor pemerintahan, penerapan *good governance* juga turut mendorong terbentuknya *good corporate governance* di sektor non-pemerintah. Dengan pondasi tata kelola yang kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, diharapkan Indonesia dapat menuju arah pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara spesifik kontribusi prinsip-prinsip *good governance* terhadap efektivitas dan tanggung jawab dalam akuntansi sektor publik. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas memengaruhi kualitas laporan keuangan serta mengevaluasi hambatan dalam implementasinya di instansi pemerintah. Rumusan masalah mencakup sejauh mana prinsip *good governance* diterapkan dan dampaknya terhadap sistem akuntansi publik yang andal. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman teoritis mengenai integrasi tata kelola yang baik dalam praktik akuntansi publik serta menawarkan kontribusi praktis sebagai referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam dunia pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pengelolaan keuangan publik. Dalam pengupayaan tersebut, akuntansi sektor publik sebagai alat untuk mendukung pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik secara tepat dan efisien. Menurut Karlina et al., (2023) Akuntansi sektor publik diarahkan untuk memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik adalah kemudahan akses yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Untuk menjamin efektivitas dan manfaat layanan tersebut, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan optimal akuntansi sektor publik sebagai landasan utama.

Sehingga perlu diadakan adanya pengoptimalan penggunaan anggaran pemerintahan dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau *value for money*, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini dijalankan melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang difasilitasi oleh

sistem akuntansi sektor publik. Melalui peran Good Governance dalam akuntansi sektor publik didapatkan keserasian antara transparansi, akuntabilitas, dan akuntansi sektor publik merupakan elemen penting dalam pelaksanaan good governance, yang tidak hanya menekankan pada kepatuhan, melainkan juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara lebih lanjut.

Konsep Dasar Good Governance

Good governance sendiri dapat dikatakan sebagai “Pemerintahan yang Baik” maka dari itu diperlukan beberapa konsep untuk menciptakan pemerintahan yang baik di Indonesia. Menurut konteks di Indonesia, good governance mencakup tata tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Menurut Addink (2018), *good governance* adalah konsep umum yang di dalamnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok nilai. Kelompok pertama adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum, kelompok kedua adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan demokrasi dan yang terakhir kelompok ketiga adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kelembagaan dan konstitusional modern. Nilai-nilai ini dapat dilihat sebagai sumber dalam pengembangan lebih lanjut dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Dwiyanto et al., (2021) Good Governance mengacu pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan penuh tanggung jawab, yang berjalan selaras dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Konsep ini juga menekankan pencegahan kesalahan pendistribusian dana investasi, upaya pemberantasan korupsi di bidang politik maupun administratif, pelaksanaan disiplin anggaran yang ketat, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung perkembangan kegiatan bisnis.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan beberapa penerapan dan praktik tata kelola yang baik sebagai objek studi yang terpisah. Tujuan diadakannya *good governance* adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor publik dan mencegah praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini sangat relevan dengan pengelolaan keuangan sektor publik yang membutuhkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh El Kezazy et al., (2024) yang menyatakan bahwa *The significance of good governance is grounded in its deep impact on the credibility of local institutions and the level of citizen satisfaction. In an environment where public trust is paramount, governance that is open and accountable is a fundamental requirement. Local authorities, due to their proximity to the citizens, are especially attentive to these matters.* Bisa dikatakan bahwa pentingnya good governance didasarkan pada pengaruh mendalamnya terhadap kredibilitas institusi lokal dan tingkat kepuasan warga. Dalam kondisi dimana kepercayaan publik sangat penting, tata kelola yang terbuka

dan bertanggung jawab menjadi syarat utama. Otoritas daerah, karena kedekatannya dengan masyarakat, sangat memperhatikan hal-hal tersebut.

Konsep Transparansi

Transparansi ialah prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mencari informasi secara luas terkait keuangan daerah melalui penerapan transparansi. Setiap orang yang membutuhkan data memiliki hak dan kebebasan untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan mengenai pemerintahan, termasuk proses penyusunan kebijakan, pelaksanaannya dan hasil yang diperoleh. Menurut PP No. 24 Tahun 2005, transparansi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan dasar bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan menyeluruh bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang telah ada. Sedangkan menurut Sari et al., (2021) Transparansi informasi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat memahami, terutama terkait informasi keuangan dan fiskal, yang disampaikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Transparansi dapat terwujud apabila tugas dan wewenang dijalankan dengan jelas,

proses penganggaran dilakukan secara terbuka, terdapat jaminan integritas dari pihak independen terhadap penyajian informasi fiskal beserta penjelasannya, serta informasi tersebut tersedia bagi publik.

Transparansi merupakan suatu prinsip dimana proses perumusan kebijakan, baik yang bersifat politik maupun administratif oleh pemerintah, organisasi maupun badan usaha dapat diakses dan dipahami oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Menurut penelitian Edowai et al., (2021) transparansi informasi mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya tindak kecurangan, termasuk korupsi, dalam pemerintahan karena setiap tahap dan hasil aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipantau secara jelas. Dalam kerangka *good governance* praktik pemerintahan yang tertutup tidak diperbolehkan karena tata kelola yang baik mengharuskan akuntabilitas dan akses publik terhadap proses pengambilan keputusan. Dwi et al., (2017) menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu fondasi utama dalam penerapan *good governance* yang memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik diartikan sebagai pihak yang dipercayakan harus bertanggung jawab dan menjelaskan semua tindakan serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal), yang berhak dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal ini disebabkan karena karena akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang mewajibkan semua tindakan dan capaian akhir pemerintah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU Nomor 28 Th. 1999 menurut Freddy et. al (2023). Sedangkan menurut Widiyanti (2017) akuntabilitas adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu unit organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan, mulai dari awal hingga akhir, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam ranah pelayanan publik, akuntabilitas tidak semata-mata berkaitan dengan transparansi, melainkan juga termasuk kewajiban moral dan etis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan dan menyampaikan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance dengan Akuntansi Sektor Publik

Konsep transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam menerapkan *good governance* lewat akuntansi sektor publik. Transparansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi keuangan pemerintah secara terbuka, menjadikan pengelolaan keuangan lebih jelas dan mudah diawasi, sehingga dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan anggaran yang dikelola. Akuntansi sektor publik menjadi instrumen utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan sesuai standar, sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dengan jelas.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas saling mendukung dan dijalankan melalui akuntansi sektor publik sebagai bagian dari *good governance*. Keduanya tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berfokus pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas, dalam praktik akuntansi sektor publik. Tujuan penelitian bukan untuk mengukur hubungan variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami makna, konteks, dan proses yang mendasari pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga pengawasan (BPK, KPK), jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta literatur akademik lain yang relevan. Untuk memastikan validitas dan relevansi literatur yang digunakan, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara jelas. Literatur yang dipilih merupakan karya yang membahas topik tentang *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan akuntansi sektor publik, dengan rentang waktu publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2025. Hanya sumber berbahasa Indonesia atau Inggris yang dapat diakses secara penuh dan telah melalui proses *peer review* yang diikutsertakan dalam analisis. Sebaliknya, literatur non-ilmiah seperti opini media, blog pribadi, atau artikel yang tidak relevan dengan sektor publik dan tidak memenuhi standar akademik dikecualikan dari kajian.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang dipadukan dengan pendekatan analisis tematik. Tahapan analisis diawali dengan mengumpulkan dan membaca secara cermat semua dokumen yang memenuhi kriteria. Selanjutnya dilakukan proses *coding* manual, yaitu penandaan secara sistematis terhadap kata kunci, frasa, dan kalimat yang relevan dengan tema utama penelitian. Dalam tahap ini, digunakan teknik *open coding* untuk mengidentifikasi potongan informasi yang bermakna, yang kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema seperti “pengaruh transparansi terhadap laporan keuangan”, “akuntabilitas dalam sistem akuntansi publik”, serta “hambatan struktural implementasi *good governance*”. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan analisis tematik untuk menemukan pola hubungan antar tema, menyusun argumen interpretatif, serta menarik kesimpulan teoritis dan praktis dari kajian yang dilakukan.

Guna menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Langkah ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai jenis dokumen yang berbeda—baik dari jurnal akademik, laporan lembaga, maupun regulasi pemerintah—untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, validitas isi juga diperkuat dengan memastikan bahwa referensi yang digunakan berasal dari sumber terpercaya, seperti jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Hasil awal temuan juga dikonfirmasi melalui diskusi bersama dosen

pembimbing dan melalui forum diskusi ilmiah internal guna mendapatkan masukan konseptual yang memperkaya validitas argumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas dalam Akuntansi Sektor Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan *good governance*, khususnya dalam tata kelola akuntansi sektor publik. Kedua konsep ini saling terkait erat, di mana transparansi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya akuntabilitas yang substansial. Transparansi memungkinkan publik mengakses informasi yang relevan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja serta tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks ini, akuntansi sektor

publik memegang peranan penting karena berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan entitas pemerintah, bukan untuk mencari keuntungan seperti sektor swasta, melainkan untuk menjamin pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Dengan akuntansi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana.

Sejalan dengan hal tersebut, Sumantri (2023) menyatakan bahwa transparansi sangat signifikan bagi para pemangku kepentingan, terutama warga negara, karena menjadi sarana utama dalam memperkuat akuntabilitas. Hasil penelitian Rusrina (2021) turut memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik, seperti yang terlihat pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan serupa juga ditemukan dalam penelitian Oktaviani (2021) yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; semakin baik penerapan akuntansi sektor publik, maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Selain itu, Umar et al. (2018) menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses, dan hasil pelaksanaannya.

Lebih lanjut, penelitian Novianti et al. (2019) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menandakan bahwa keterbukaan informasi yang baik mendorong peningkatan akuntabilitas. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Wijana et al. (2023), yang membahas mengenai apakah penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, karena laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat memungkinkan publik untuk menilai secara langsung kinerja pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik. Akuntansi sektor publik memainkan peran strategis dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang transparan, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan efektivitas dalam pelayanan publik.

2. Dampak Penerapan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Publik

Penerapan prinsip *good governance* memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sektor publik. penelitian yang dilakukan oleh

Nurhidayat (2023), menyajikan enam prinsip tata pemerintah yang baik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi, daya tanggap dan keadilan terbukti memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Salah satu dampak nyata dari implementasi *good governance* adalah meningkatnya transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Ketika lembaga publik membuka akses terhadap informasi anggaran dan realisasi keuangan secara terbuka, masyarakat serta pemangku kepentingan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan pengawasan, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih akuntabel dan terpercaya.

Menurut World Bank (2007), penerapan *good governance* dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas lembaga sektor publik. Hal ini sejalan

dengan temuan Junyantara dan Putra (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Peningkatan ini terjadi karena adanya dorongan bagi pejabat publik untuk menjalankan tanggung jawab secara terbuka dan akuntabel, serta pentingnya pemahaman pegawai terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan keuangan yang tepat dan terpercaya. Contoh konkret dapat dilihat pada Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan sistem *e-budgeting* dan *e-audit*, sehingga memungkinkan transparansi real-time dalam proses penganggaran dan pengeluaran daerah. Dampaknya, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan keuangan Surabaya meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir (BPK RI, 2023).

Lebih jauh, Amin Widjaja (2012) menekankan bahwa implementasi *good governance* memiliki manfaat utama dalam meminimalkan *agency cost*, meningkatkan kinerja pemerintahan, serta memperbaiki citra institusi pemerintah. *Agency cost* merupakan biaya akibat pendelegasian wewenang yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan prinsip akuntabilitas dan integritas, potensi penyimpangan dapat ditekan, sehingga pengelolaan sumber daya publik menjadi lebih efisien. Selain itu, peningkatan kinerja terjadi ketika tata kelola dilakukan secara transparan dan partisipatif, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.

Kepercayaan masyarakat pun akan tumbuh ketika pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan tugas secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya membentuk citra positif lembaga pemerintahan. Manfaat tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap kesinambungan pembangunan, memperkuat legitimasi pemerintah, dan meningkatkan kapasitas negara dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, implementasi *good governance* merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Hambatan dalam Implementasi Good Governance di Sektor Publik

Meskipun prinsip *good governance* telah menjadi acuan utama dalam reformasi tata kelola sektor publik, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik secara struktural maupun kultural. Hambatan-hambatan ini berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Salah satu hambatan utama dalam penerapan *good governance* adalah rumitnya sistem birokrasi. Birokrasi yang tidak efisien sering menjadi penghalang dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Menurut Yasa et al. (2021), ketidaksiapan birokrasi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat merupakan faktor signifikan yang

menghambat kualitas layanan. Prosedur administrasi yang terlalu panjang dan kompleks dapat memperlambat distribusi informasi serta proses pelayanan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Korupsi di sektor publik merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan prinsip *good governance* saat ini. Keterlibatan pejabat pemerintah dalam tindakan korupsi menjadi penghalang utama bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan dua pilar utama dalam *good governance*. Hasim (2023) menyatakan bahwa korupsi tidak hanya menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga melemahkan kinerja dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip *good governance*. Ketika pemerintah tidak memiliki cukup pegawai yang

kompeten dan terlatih, maka pengelolaan serta penyampaian pelayanan kepada masyarakat pun menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi serta pengembangan kapasitas aparatur negara menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi *good governance* berjalan dengan baik. Meskipun konsep ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu layanan publik, berbagai hambatan struktural seperti birokrasi yang tidak efisien, praktik korupsi, dan kurangnya tenaga kerja yang berkualitas harus diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang baik, terutama pada aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban, berperan penting dalam memperkuat sistem akuntansi sektor publik. Temuan ini menegaskan hubungan erat antara kedua elemen tersebut, yang secara positif meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik. Selain itu, studi ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat sebagai kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Sebagai langkah praktis, pemerintah disarankan untuk meningkatkan mekanisme keterbukaan dengan menyediakan akses informasi keuangan yang mudah dipahami publik. Pertanggungjawaban juga perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat serta penyampaian laporan yang tepat waktu dan akurat. Membangun komunikasi yang aktif antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi, disarankan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi, serta penguatan peraturan dan mekanisme pengawasan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, sehingga hasilnya sangat bergantung pada sumber pustaka tanpa adanya pengamatan langsung di lapangan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dan memperluas cakupan studi ke berbagai tingkat pemerintahan dan konteks kelembagaan yang lebih beragam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Secara teoritis, studi ini memperkuat serta memperluas teori tata kelola yang baik dengan menunjukkan hubungan kuat antara keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan ini membuka peluang untuk studi lanjutan yang lebih spesifik, terutama untuk menguji penerapan prinsip-prinsip ini secara empiris dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, G. H. (2018). *Good Governance: Importance in Practice, Theories and Definitions*. *Halu Oleo Law Review*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2347>
- Amin, W. T. (2012). *Good Governance: Prinsip dan aplikasi dalam konteks Indonesia*. Harvarindo.
- Aulia, Oktaviani. (2021). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pekanbaru (Laporan Skripsi)*. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/10582>
- BPK RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

- Kota Surabaya Tahun 2022. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id/>
- Dwi, P. T., Meinarni Asnawi, S. E., & CBV, C. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Auditor pada Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 15-33.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almailda.
- El Kezazy, H., Hilmi, Y., Ezzahra, E. F., & Hocine, I. Z. H. (2024). Conceptual Model of The Role of Territorial Management Controller and Good Governance. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1-19.
- Hasim, D. (2023). Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 3(1), 1–15.
- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru), Penerbit : Andi Yogyakarta
- Novianti, A., Kusumah, R. W. R., & Pepi, V. D. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Rusrina, R. (2020). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi SI*, 1–9.
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 12(2).
- Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 38–59. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205>
- Sumantri, I. (2023). Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 97–109. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.110>
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Umar, Z., Cut Fittika, S., & Khairunnisa. (2018). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi Inspektorat Aceh. *Jurnal Kolegial*, 6(2), 136–148.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nusratunnisa, Y. (2023). Penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 240–250. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1588>
- World Bank. (2007). *Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption*. The World Bank. <https://documents.worldbank.org/>

- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Yuniar, L. S., Gunarsa, A., Asdar, F., Ralis, G., Ramadhani, A. P., & Buntulabi, D. R. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). *Owner*, 7(2), 1017–1025. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1313>